

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. . Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006.
- Jimly Asshiddiqie, "*Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- Bafadal, Ibrahim *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 .
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas hukm pidana* cetakan III edisi revisi 2008, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.
- H R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Irwan, Hamzani Achmad, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya: Yustisia*, Edisi 90, September – Desember 2014 BIKSA MAHWASTU DASI
- Khaerudin, dkk, "*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*" , Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007
- Moonti, Roy Marthen. "*Ilmu Perundang Undangan*." Makassar: Keretakupa, 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, Revisi 2013
- Muladi, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Mulyadi, Lilik, "*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*", PT. Alumni, Bandung 2008.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.
- Prodjodikoro, Wirdjono, "*Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*", Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012.
Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:
Modern English Press. 1991.
Soekanto, Soerjono, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*",
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Setiadi, Edi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem
Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.

B.Peraturan-Perundangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Komite Sekolah.
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah.
Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

C. Jurnal & Karya Ilmiah

Suharjono, Muhammad, "*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam
Mendukung Otonomi Daerah*", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.9,
februari 2014.
Misbah, "*Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan*", *Insania*, Vol.14 No.1
Samodra Wibawa, "*Efektifitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Tambang,
Jurnal Ilmu Administrasi Negara*" Vol 12 No 2. 2013
Dayanto, *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia
Berbasis Pamcasila*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Edisi
September 2013.

BPKP. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. (Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI), 2002.

Anggrasena, Bima, *strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat pattuh hukum*, Tesis (Untuk memperoleh Gelar Magister Universitas Diponegoro). 2010.

Nola, Luthvi Febryka, *“Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi tenaga Kerja Indonesia (TKI), NEGARA HUKUM: VOL 7, No.1, Juni 2016*

D. Internet

“ *Ridwan Kamil Tanggapi dugaan SMAN 3 Kota Bekasi Lakukan Pungutan*”

<https://metro.tempo.co/read/1658419/ridwan-kamil-tanggapi-dugaan-sman-3-kota-bekasi-lakukan-pungutan-bolehkah-sekolah-minta-sumbangan>. 18 November 2022.

“ *Wali Murid SMPN 1 Bumiayu Brebes Sambat Ditarik Sumbangan* “

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6327137/wali-murid-smpn-1-bumiayu-brebes-sambat-ditarik-sumbangan> , 03 November 2022.

Delik Pungutan Liar dalam Layanan Publik,
<https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/5a43f0ab1419357> 2 Juli 2023